

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							7.413.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kebutuhan penunjang dalam pelaksanaan kegiatan dibutuhkan rencana mendasar dalam kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan fokus berkontribusi kecapaian RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026 dan penyusunan Renstra 2026-2031	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen	1.451.000,00	Kasubag Renvalkeu
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kebutuhan dasar dalam penyusunan dokumen RKA, perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang disusun	Pelaksanaan penganggaran yang selalu menyesuaikan mencukupi kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dan inovatif	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen	1.482.000,00	Kasubag Renvalkeu
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik, Dinkominfo perlu memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang ada di Dinkominfo	a. Maksud : Untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang ada di Dinkominfo b. Tujuan : 1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas – tugas pokok Dinkominfo Kota Pekalongan. 2) Mendeteksi terjadinya kemungkinan penyimpangan sejak dini serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15 Laporan	4.480.000,00	Kasubag Renvalkeu
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.039.248.000,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dalam rangka pemenuhan gaji dan tunjangan ASN untuk mendukung administrasi perkantoran Dinkominfo	a. Maksud Maksud sub kegiatan ini adalah pemberian kesejahteraan ASN di lingkungan Dinkominfo b. Tujuan Tujuan sub kegiatan ini memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN sesuai peraturan perundang-undangan	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 orang	4.038.453.000,00	Kasubag Renvalkeu
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sebagai pertanggungjawaban dari program/kegiatan yang terlaksana, laporan keuangan akhir tahun SKPD harus disusun secara tepat dan transparan sesuai dengan peraturan - peraturan yang berlaku	a. Maksud Penyusunan laporan akhir tahun SKPD b. Tujuan menyajikan laporan keuangan akhir tahun untuk perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun berikutnya	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan	795.000,00	Kasubag Renvalkeu
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							50.000.000,00	
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam bagi hasil cukai (dbcht) dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi terkait peredaran rokok illegal di kota pekalongan	a. Maksud Memberikan pemahaman terkait pentingnya cukai untuk pembangunan b. Tujuan agar Masyarakat memahami peraturan perundangan terkait cukai	DBHCHT 2026	Januari-Desember	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 orang	50.000.000,00	Kasubag Umpeg

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administrasi Umum Perangkat Daerah							143.166.000,00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Kebutuhan mendasar dalam layanan publik guna peningkatan budaya kerja	a.Maksud Peningkatan layanan publik berupa fasilitas dasar layanan yang memadai b.Tujuan Memenuhi kebutuhan pemeliharaan listrik bangunan kantor	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket	1.000.000,00	Kasubag Umpeg
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dalam rangka mendukung pelayanan administrasi perkantoran perlu dipenuhi kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	a. Maksud Maksud sub kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan b. Tujuan Tujuan sub kegiatan ini memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor,dan Kebutuhan akan peralatan dan bahan kerja yang berupa alat tulis kantor (ATK)	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket	16.844.000,00	Kasubag Umpeg
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dalam rangka mendukung pelayanan administrasi perkantoran perlu dipenuhi kebutuhan penyediaan peralatan rumah tangga	a. Maksud Maksud sub kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan b. Tujuan Tujuan sub kegiatan ini memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 paket	4.000.000,00	Kasubag Umpeg
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dalam rangka mendukung pelayanan administrasi perkantoran perlu dipenuhi kebutuhan penyediaan peralatan rumah tangga	a. Maksud Maksud sub kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan b. Tujuan Tujuan sub kegiatan ini memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket	33.559.000,00	Kasubag Umpeg
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan dan merupakan pendukung	a. Maksud Maksud sub kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan b. Tujuan Tujuan sub kegiatan ini memenuhi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 2 paket	15.502.000,00	Kasubag Umpeg
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Uang Harian, Transport dan Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dinkominfo Kota Pekalongan perlu disediakan secara baik sehingga mampu memberikan keluaran berupa terpenuhinya rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang memadai dan efisien.	a. Maksud Supaya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perjalanan dinas luar daerah untuk pegawai dinkominfo Kota Pekalongan. b. Tujuan Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dinkominfo Kota Pekalongan.	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 laporan	72.261.000,00	Kasubag Umpeg
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.767.533.000,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat dibutuhkan dalam pengiriman surat menyurat ke dalam maupun keluar daerah, dan materai sebagai alat pengesahan dalam keuangan untuk kelengkapan SPJ.	a. Maksud Maksud sub kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan b. Tujuan memudahkan dalam pengiriman surat menyurat ke luar daerah melalui via pos, dan materai sebagai legalisasi bukti pengeluaran keuangan.	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 laporan	1.600.000,00	Kasubag Umpeg
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik merupakan kebutuhan vital yang harus ada. Kebutuhan Komunikasi sumber daya air dan listrik sebagai sarana jalanya operasional suatu perangkat daerah	a. Maksud Maksud sub kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan b.Tujuan Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik adalah memberikan penerangan, menyediakan sarana komunika	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan	429.580.000,00	Kasubag Umpeg

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor menunjang dalam kegiatan perkantoran sehari-hari sebagai sarana kebersihan lingkungan kantor	a. Maksud Maksud sub kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan perkantoran b.Tujuan Menyediakan Bahan Dan Alat Kebersihan Dan Menyediakan Alat Tulis Kantor	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan	2.336.353.000,00	Kasubag Umpeg
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang						200.444.000,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	sangatlah perlu dilakukan karena Kendaraan dinas/operasional tersebut merupakan alat pendukung yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan yang mendukung kegiatan bidang maupun untuk kesekretariatan	a. Maksud peningkatan pelayanan pemerintahan. b.Tujuan Tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional untuk memenuhi kendaraan dinas yang siap pakai	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 24 unit	103.240.000,00	Kasubag Umpeg
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor sangatlah perlu dilakukan karena Perlengkapan Gedung Kantor tersebut merupakan alat pendukung yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan	a. Maksud Maksud sub kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan b.Tujuan Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah pemeliharaan gedung kantor untuk meningkatkan terwujudnya gedung kantor yang representatif, serta memberikan honor bagi Tenaga Kegiatan	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 unit	51.039.000,00	Kasubag Umpeg
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sangatlah perlu dilakukan karena pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya sub kegiatan tersebut merupakan pendukung yang sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan	a. Maksud Maksud sub kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan b.Tujuan memenuhi kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 unit	46.165.000,00	Kasubag Umpeg

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						2.339.166.000,00	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2.339.166.000,00	
1	Relasi Media	Layanan hubungan media adalah upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun, menjaga, dan meningkatkan hubungan positif dengan media masa, serta menciptakan pemahaman yang baik terkait dengan program pemerintah yang dijalankan melalui diseminasi informasi.	a.Maksud membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan yang positif antara instansi dan media massa b. Tujuan 1) membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pemerintahan Kota Pekalongan 2) Membangun citra positif instansi-instansi di pemerintah Kota Pekalongan 3) Menyediakan informasi yang akurat 4) Membangun hubungan dengan media massa 5) Meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan program-program yang dijalankan oleh Pemkot Pekalongan	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2.terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media. 12 Laporan	529.016.000,00	JF Prahum
2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Komunitas Informasi Masyarakat atau yang disingkat dengan KIM menurut peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.4 Tahun 2024 Pasal 23 ayat 2 meliputi komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi informasi; dan/atau komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaan masyarakat serta melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi. Dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat; berkedudukan di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain; ditetapkan minimal oleh kepala desa, lurah, atau yang disebut dengan nama lain; dan terdaftar pada Dinas di tingkat kabupaten/kota yang aktivitasnya melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif yang memiliki fungsi kehumasan Pemerintah Daerah. Bahwa di setiap kelurahan/desa di kota/kabupaten, keberadaan Komunitas ini memiliki fungsi kehumasan Pemerintah Daerah Kemitraan Komunikasi dengan KIM merupakan kerjasama kegiatan antara Dinas dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan kapasitas jejaring dalam diseminasi Informasi Publik.	a. Maksud : mengembangkan dan memberdayakan KIM yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi informasi publik b. Tujuan : 1) Mewujudkan komunitas yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi sehingga dapat bekerjasama dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang komunikasi dan informatika yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 2) mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok masyarakat maupun dengan pihak lainnya (pemerintah), sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa.	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 2 Komunitas	3.704.000,00	JF Prahum

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pelayanan Informasi Publik	Informasi merupakan hak dasar bagi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya agar dapat tercapai aktualisasi diri dan pengembangan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik.	a.Maksud Meningkatkan pelayanan informasi publik guna terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Tujuan a) Membangun persamaan persepsi tentang keterbukaan informasi publik kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kota Pekalongan b) Mewujudkan PPID Utama dan PPID Pembantu yang berkompeten dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas. c) Mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Keterbukaan Informasi Publik dan hak untuk tahu. d) Dapat mewujudkan arus informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal pengawasan kepada pemerintah dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat. e) Terlaksananya publikasi informasi dan dokumentasi pemerintahan Kota Pekalongan yang cepat dan informatif. f) Tersusunnya daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan Tahun 2025 g) Terlaksananya Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kota Pekalongan dan ikut serta dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah sehingga Kota Pekalongan yang informatif dapat dipertahankan.	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 12 Permohonan	49.352.000,00	JF Prahum muda

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Monitoring opini dan aspirasi publik sangat penting dalam konteks pemahaman dan pengelolaan masalah dalam masyarakat. Aktivitas ini membantu Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengetahui bagaimana opini dan aspirasi masyarakat khususnya Kota Pekalongan yang sedang beredar. Opini dan Aspirasi masyarakat tersebut nantinya dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai pertimbangan untuk merumuskan program dan kebijakan.	Maksud : 1. Memahami pendapat dan kebutuhan masyarakat agar pemerintah dapat lebih dekat dengan realitas yang terjadi dimasyarakat 2. Mendengarkan Suara Masyarakat : dengan mengetahui apa yang ramai diperbincangkan masyarakat pemerintah dapat mengambil kebijakan dan program yang dapat disesuaikan dengan kepentingan masyarakat 3. Mendukung adanya demokrasi : dengan adanya kegiatan ini masyarakat mendapatkan andil dalam menyumbangkan bahan untuk nantinya sebagai dasar pengambilan kebijakan Tujuan : 1. Pengambilan keputusan yang lebih baik : dengan memantau opini dan aspirasi publik pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat secara lebih baik. 2. Evaluasi Kinerja : dengan memantau opini dan aspirasi masyarakat pemerintah dapat menilai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat 3. Identifikasi isu penting : kegiatan ini membantu mengidentifikasi isu penting yang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat 4. Mendukung adanya demokrasi : dengan adanya kegiatan ini masyarakat mendapatkan andil dalam menyumbangkan bahan untuk	APBD 2026	Januari - Desember	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 12 rekomendasi	324.759.000,00	JF Prahum muda
5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Perubahan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta dinamika sosial dan politik akan mempengaruhi pilihan strategi komunikasi dan diseminasi informasi publik. Hal ini menjadi tantangan bagi pejabat publik dan humas Pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan tersebut.	Maksud dan Tujuan : a. Merencanakan media komunikasi publik; b. Menyelenggarakan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah yang dikelola Dinas; c. Menyelenggarakan diseminasi informasi melalui berbagai jenis media; d. Memanfaatkan media berbayar maupun tidak; dan e. evaluasi pemanfaatan media komunikasi publik.	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 2 media	1.404.435.000,00	JF Prahum muda
6	Penyusunan Konten	Dalam era digital, penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan menarik menjadi salah satu kunci keberhasilan komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan program, kebijakan, dan layanan publik secara efektif melalui berbagai media, termasuk media digital. Untuk mendukung hal tersebut, sub kegiatan penyusunan konten dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, dan partisipatif, sehingga mampu meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pembangunan daerah	a.Maksud Meningkatkan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik b. Tujuan Menyediakan konten informasi yang kredibel kepada masyarakat melalui berbagai saluran media komunikasi publik	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Konten Informasi Publik 9072 konten	27.900.000,00	JF Prahum
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							903.031.000,00	
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							19.000.000,00	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Pemerintah Kota Pekalongan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan menyediakan Layanan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kota Pekalongan untuk menunjang kinerja aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan dan layanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	a. Maksud Memberikan layanan pengelolaan nama domain / sub domain bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan b. Tujuan 1. Penyediaan layanan nama subdomain pada domain pekalongankota. go.id dan dprd-pekalongankota.go .id bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. 2. Memastikan nama subdomain dapat diakses melalui jaringan Batiknet maupun internet	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 1 Dokumen	19.000.000,00	
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							884.031.000,00	
1	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Pusat Data nasional merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyediaan Pusat Data nasional ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; Pelaksanaan amanat dalam Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kominfo diberikan tugas melaksanakan pengoordinasian dan pengembangan SPBE pada Domain Aplikasi dan Domain Infrastruktur,	a. Maksud Mengintegrasikan aplikasi pada pusat komputasi Pemerintah Kota Pekalongan dengan pusat data nasiona b. Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan SPBE; 2. Melakukan percepatan integrasi dan konsolidasi data pemerintah dalam rangka mewujudkan sata data Indonesia sebagai "single source of thruth" ;	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional 1 aplikasi	303.000,00	JF Prakom Muda

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), diperlukan koordinasi yang terintegrasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan manajemen SPBE. Koordinasi yang optimal menjadi kunci untuk menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi SPBE agar sesuai dengan arsitektur, peta rencana, serta kebijakan nasional dan daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE perlu didukung dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2026 sebagai pedoman yang jelas dan terarah, guna memastikan keterpaduan program, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan kualitas layanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik secara berkelanjutan.	a. Maksud : mewujudkan keterpaduan dan keselarasan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) antar perangkat daerah melalui koordinasi yang efektif, sehingga penyelenggaraan SPBE dapat berjalan sesuai dengan kebijakan, arsitektur, dan rencana induk SPBE yang telah ditetapkan. b. Tujuan Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi SPBE. Menyelaraskan implementasi SPBE agar sesuai dengan arsitektur SPBE dan kebijakan nasional maupun daerah. Mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya TIK dan aplikasi pemerintahan. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. Mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan SPBE yang terintegrasi	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 1 Dokumen	1.424.000,00	JF Prakom Muda
3	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kebutuhan akan teknologi informasi telah mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menempatkan infrastruktur jaringan internet menjadi sarana prioritas dan penting dalam melaksanakan kegiatan dan kebutuhan sehari-hari. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan fasilitas infrastruktur jaringan internet yang berkualitas untuk dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.	a. Maksud : Memberikan pelayanan dalam penyediaan sarana infastruktur jaringan internet. b. Tujuan a) Pemeliharaan infastruktur jaringan internet pada seluruh OPD di Pemkot Pekalongan; b) Penyediaan Bandwidth pada seluruh OPD di Pemkot Pekalongan; c) Penyediaan akses wifi gratis bagi masyarakat.	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 30 perangkat daerah	776,836,000.00	JF Prakom Muda

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan portal pelayanan yang terintegrasi sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Portal pelayanan terintegrasi berfungsi sebagai sarana utama penyelenggaraan layanan pemerintahan secara elektronik yang menghubungkan berbagai jenis layanan antar perangkat daerah dalam satu platform yang terpadu. Namun, optimalisasi pemanfaatannya memerlukan koordinasi yang intensif antar perangkat daerah agar layanan yang disediakan selaras, terstandar, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi perlu dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar pemanfaatan portal pelayanan dapat berjalan secara optimal, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan	Maksud memastikan pemanfaatan portal pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi dapat dilakukan secara optimal, selaras, dan terkoordinasi antar perangkat daerah, sehingga pelayanan publik dapat disediakan secara cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Tujuan Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pemanfaatan portal pelayanan terintegrasi. Menjamin keselarasan layanan yang disediakan melalui portal agar sesuai standar dan prosedur pelayanan publik. Memaksimalkan efektivitas dan efisiensi penggunaan portal sebagai sarana layanan publik elektronik. Meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang berbasis elektronik, responsif, dan akuntabel.	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional 2 Layanan	2.409.000,00	JF Prakom
5	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan, diperlukan koordinasi yang terarah dalam pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus pemerintah daerah agar selaras dengan arsitektur dan peta rencana SPBE yang telah ditetapkan, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi umum SPBE. Tanpa koordinasi yang baik, pembangunan aplikasi berpotensi tidak terintegrasi, tumpang tindih, dan kurang efisien dalam pemanfaatan sumber daya. Oleh karena itu, pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus serta Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE perlu dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna memastikan kesesuaian perencanaan, keterpaduan implementasi antar perangkat daerah, serta peningkatan kualitas layanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik di lingkungan	a. Maksud : mewujudkan keselarasan dan keterpaduan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus pemerintah daerah dengan arsitektur dan peta rencana SPBE yang telah ditetapkan, serta mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi umum SPBE melalui koordinasi yang efektif antar perangkat daerah. b. Tujuan Menjamin pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus pemerintah daerah sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE. Mencegah terjadinya duplikasi aplikasi dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya TIK. Meningkatkan integrasi dan interoperabilitas aplikasi pemerintahan antar perangkat daerah. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi umum SPBE dalam mendukung proses pemerintahan dan pelayanan publik. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik secara berkelanjutan.	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE 2 Aplikasi	158.873.000,00	JF Prakom

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan tata kelola SPBE yang komprehensif dan selaras dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah. Penyusunan kebijakan yang mencakup arsitektur SPBE, peta rencana, proses bisnis, serta rencana dan anggaran SPBE memerlukan koordinasi yang efektif antar perangkat daerah agar kebijakan yang dihasilkan konsisten, terintegrasi, dan dapat diimplementasikan secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola SPBE perlu dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna memastikan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.	a. Maksud : mewujudkan keselarasan dan keterpaduan penyusunan kebijakan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah melalui koordinasi antar perangkat daerah, sehingga kebijakan yang mencakup arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta rencana dan anggaran SPBE dapat disusun secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. b. Tujuan Menyelaraskan penyusunan arsitektur SPBE, peta rencana, dan proses bisnis antar perangkat daerah. Menjamin keterpaduan rencana dan anggaran SPBE dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Meningkatkan kualitas kebijakan tata kelola SPBE yang terukur dan dapat diimplementasikan. Mendorong efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya SPBE. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 1 Dokumen	2.659.000,00	JF Prakom
7	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi yang akurat, terintegrasi, dan dapat diakses oleh perangkat daerah serta masyarakat, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan koordinasi pengelolaan data dan informasi sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pengelolaan data dan informasi yang baik berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Namun, optimalisasi pengelolaan data dan informasi memerlukan koordinasi yang intensif antar perangkat daerah agar data yang tersedia terstandar, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan secara efektif. Oleh karena itu, pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi perlu dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar pengelolaan data dan informasi dapat berjalan secara optimal, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola	a. Maksud : Memastikan pengelolaan data dan informasi pemerintah daerah dilakukan secara optimal, selaras, dan terkoordinasi antar perangkat daerah, sehingga informasi yang disediakan dapat diakses dengan cepat, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif. b. Tujuan : 1) Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan data dan informasi. 2) Menjamin keselarasan standar, format, dan prosedur pengelolaan data di seluruh perangkat daerah. 3) Meningkatkan aksesibilitas, akurasi, dan keterbukaan informasi bagi perangkat daerah dan masyarakat.	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah 1 Dokumen	Rp1.524.000	JF Prakom

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						7.554.000,00	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						7.554.000,00	
1	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang efektif, efisien, serta berbasis data, ketersediaan statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kebutuhan yang sangat penting. Data statistik sektoral yang dihasilkan oleh perangkat daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan. Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan kegiatan statistik sektoral masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah sebagai produsen data, perbedaan standar dan metodologi pengumpulan data, keterbatasan kualitas data, serta belum tersusunnya metadata yang memadai. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar pengambilan keputusan. Sejalan dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, diperlukan pengelolaan kegiatan statistik sektoral yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Pengelolaan tersebut mencakup proses perencanaan data, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dokumentasi, hingga diseminasi data sesuai dengan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi.	Maksud : Pelaksanaan kegiatan statistik sektoral sudah memenuhi prinsip Satu Data untuk menghasilkan kualitas data yang baik guna terwujudnya Satu Data Indonesia Tujuan : Kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sudah dilengkapi metadata	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 15 dokumen	7.554.000,00	Kasi Statistik

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi						17.468.000,00	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			APBD 2026	Januari-Desember		17.468.000,00	
1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dalam era digital dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi di pemerintahan, keamanan informasi menjadi aspek krusial untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta informasi baik yang berbasis elektronik maupun non-elektronik. Pemerintah daerah menghadapi berbagai risiko keamanan informasi, termasuk kebocoran data, gangguan sistem, maupun penyalahgunaan informasi yang dapat berdampak pada efektivitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pelaksanaan sub kegiatan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah diperlukan sebagai upaya sistematis untuk menerapkan langkah-langkah pengamanan informasi, membangun kesadaran keamanan bagi aparatur, serta memastikan perlindungan data dan informasi daerah sesuai standar dan peraturan yang berlaku, sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang aman, terpercaya, dan akuntabel.	Maksud untuk menjamin keamanan informasi pemerintah daerah, baik yang berbasis elektronik maupun non-elektronik, melalui penerapan kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang sistematis, sehingga data dan informasi pemerintah daerah terlindungi dari risiko kebocoran, gangguan, atau penyalahgunaan. Tujuan 1) Meningkatkan perlindungan terhadap data dan informasi pemerintah daerah agar tetap aman, utuh, dan tersedia saat dibutuhkan. 2) Mencegah kebocoran, kehilangan, atau penyalahgunaan informasi pemerintah daerah. 3) Meningkatkan kesadaran dan kapabilitas aparatur dalam menerapkan prinsip keamanan informasi. 4) Mendukung tata kelola pemerintahan yang aman, transparan, dan akuntabel. 5) Menjamin kepatuhan terhadap standar dan regulasi keamanan informasi yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah.	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2 laporan	5.699.000,00	Kasi Persandian
2	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Dalam upaya meningkatkan keamanan informasi dan persandian di lingkungan pemerintahan daerah, pengelolaan sumber daya keamanan informasi menjadi sangat penting untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta informasi, baik elektronik maupun non-elektronik. Pengelolaan tersebut perlu dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan yang akurat agar setiap sumber daya, termasuk perangkat, sistem, dan SDM, dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien, dan tepat sasaran. Tanpa pengelolaan berbasis analisis kebutuhan, risiko kelemahan sistem keamanan, ketidakefisienan penggunaan sumber daya, serta potensi gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik meningkat. Oleh karena itu, pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan dan kapabilitas sumber daya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang aman, terpercaya, dan akuntabel.	Maksud Memastikan pengelolaan sumber daya keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah dilakukan secara terencana, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga mendukung perlindungan data dan informasi pemerintah daerah serta meningkatkan kapabilitas dalam menghadapi risiko keamanan informasi. Tujuan 1) Menyediakan dan mengelola sumber daya keamanan informasi dan persandian yang sesuai dengan analisis kebutuhan. 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya keamanan informasi, baik perangkat, sistem, maupun SDM. 3) Memastikan keamanan, integritas, dan ketersediaan data dan informasi pemerintah daerah. 4) Mengurangi risiko gangguan, penyalahgunaan, atau kebocoran informasi. 5) Mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang aman, terpercaya, dan akuntabel melalui pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang optimal.	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan 1 Laporan	3.649.000,00	Kasi Persandian

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Dalam era digitalisasi pemerintahan, keamanan informasi dan persandian menjadi aspek krusial untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta informasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah membutuhkan layanan keamanan informasi dan persandian yang andal, terstandar, dan berkelanjutan untuk melindungi data pemerintahan dari risiko kebocoran, gangguan, atau penyalahgunaan, baik yang berbasis elektronik maupun non-elektronik. Penyediaan layanan tersebut tidak hanya mencakup perlindungan teknis, tetapi juga dukungan operasional dan konsultasi bagi aparatur dalam menerapkan praktik keamanan informasi yang tepat. Oleh karena itu, pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian menjadi penting untuk memastikan tersedianya layanan yang memadai, terintegrasi, dan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang aman,	Maksud menyediakan layanan keamanan informasi dan persandian yang andal, terstandar, dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah, sehingga data dan informasi pemerintahan terlindungi dari risiko kebocoran, gangguan, atau penyalahgunaan, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang aman, terpercaya, dan akuntabel. Tujuan 1) Menyediakan layanan keamanan informasi dan persandian yang efektif dan terpadu bagi seluruh perangkat daerah. 2) Meningkatkan perlindungan terhadap data dan informasi pemerintah daerah, baik elektronik maupun non-elektronik. 3) Mendukung penerapan praktik keamanan informasi yang sesuai standar bagi aparatur pemerintah daerah. 4) Mengurangi risiko kebocoran, kehilangan, atau penyalahgunaan informasi. 5) Memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang aman, transparan, dan akuntabel	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian 30 Perangkat Daerah	5.461.000,00	Kasi Persandian
4	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang aman, terpercaya, dan akuntabel, tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi persandian menjadi aspek strategis yang harus diatur secara sistematis. Pemerintah daerah menghadapi risiko gangguan, kebocoran, atau penyalahgunaan data dan informasi, baik yang berbasis elektronik maupun non-elektronik, yang dapat menghambat efektivitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi diperlukan sebagai pedoman resmi untuk pengelolaan, perlindungan, dan pengawasan sumber daya informasi serta sarana persandian, sehingga memastikan seluruh aktivitas pemerintahan daerah terlindungi, terkoordinasi, dan sesuai dengan standar serta regulasi yang berlaku.	Maksud menetapkan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi persandian secara sistematis dan terarah di lingkungan pemerintah daerah, sehingga seluruh data, informasi, dan sarana persandian terlindungi, terkoordinasi, dan sesuai dengan standar serta regulasi yang berlaku. Tujuan 1) Menetapkan pedoman dan kebijakan resmi terkait tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi persandian di pemerintah daerah. 2) Meningkatkan perlindungan terhadap data dan informasi pemerintah daerah dari risiko kebocoran, gangguan, atau penyalahgunaan. 3) Menjamin koordinasi dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi serta persandian secara efektif dan efisien. 4) Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang aman, terpercaya, dan akuntabel. 5) Memastikan kepatuhan terhadap standar, regulasi, dan praktik terbaik keamanan informasi dan persandian yang berlaku.	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian 1 Dokumen	2.659.000,00	Kasi Persandian

Pekalongan, 22 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pekalongan

 
R. KARYADI, S.Sos
NIP. 197110171999031007

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN : Fasilitas Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan

KEGIATAN : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah

BIDANG PEMBANGUNAN : Sosial

SKPD : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN

-
- I Latar Belakang : Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam memberikan penghargaan kepada Warakawuri/keluarga Pahlawan Nasional sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan mereka. Kelompok sasaran tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus guna menjaga keberlanjutan kesejahteraan sosial dan mengurangi kerentanan sosial ekonomi.
- II Tujuan dan Sasaran Kegiatan
- a. Tujuan : Memberikan penghargaan atas jasa dan pengorbanan para Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan serta meringankan beban sosial ekonomi warakawuri/keluarga pahlawan dan janda/duda perintis kemerdekaan
- b. Sasaran : Warakawuri/ keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, serta janda/duda Perintis Kemerdekaan
- III Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan
- IV Anggaran Kegiatan : RP. 25.500.000
- V Volume Kegiatan : 17 Orang
- VI Indikator Kinerja Kegiatan
- a. Input/Masukan : Rp. 25.500.000
- b. Output/Keluaran : Jumlah Warakawuri/ keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial.
- c. Outcome/Hasil : Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi warakawuri/ keluarga pahlawan dan janda/duda perintis kemerdekaan
- VII Waktu Pelaksanaan dan Time Schedule
- a. Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2026
- b. Time Schedule : Terlampir

Pekalongan, 2 Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN



YOS ROSYIDI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198603 1 007

Mengetahui,
PPTK,

AHMAD HUSNI, S.Kom., M.Eng
Pembina
NIP. 19740923 200501 1 011

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
KEGIATAN : Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
BIDANG PEMBANGUNAN : Sosial
SKPD : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN

- I Latar Belakang : Sesuai Permensos Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional, DINSOS P2KB selaku dinas yang menangani urusan sosial bertanggung jawab mengelola TMP di daerah. Dan untuk pelestarian nilai kepahlawanan dan menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial serta mengkokohkan rasa persatuan dan kesatua bangsa, diperlukan keberadaan Taman Makam Pahlawan yang terawatt dan nyaman dalam pelaksanaan upacara.
- II Tujuan dan Sasaran Kegiatan
- a. Tujuan : Tercapainya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prawira Reksa Negara yang baik
- b. Sasaran : Presentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
- III Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan
- IV Anggaran Kegiatan : RP. 2.349.000
- V Volume Kegiatan : 1 Taman Makam Pahlawan
- VI Indikator Kinerja Kegiatan
- a. Input/Masukan : Rp. 2.349.000
- b. Output/Keluaran : Jumlah Makam yang terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota
- c. Outcome/Hasil : Taman Makam Pahlawan terawatt dengan baik
- VII Waktu Pelaksanaan dan Time Schedule
- a. Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2026
- b. Time Schedule : Terlampir

Pekalongan, 2 Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN



YOS ROSYIDI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198603 1 007

Mengetahui,
PPTK,

AHMAD HUSNI, S.Kom., M.Eng
Pembina
NIP. 19740923 200501 1 011

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota
BIDANG PEMBANGUNAN : Sosial
SKPD : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN

- I. Latar Belakang : Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah/provinsi/pusat kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif. Semua peserta penerima program bantuan dan pemberdayaan dari pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memuat langkah-langkah proses pengusulan, verifikasi, validasi, pendampingan, peningkatan potensi PSKS, maupun program penanganan data fakir miskin lain inisiatif pemerintah daerah.
- II. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
- a. Tujuan : Untuk memperoleh data kemiskinan yang akurat yang pada akhirnya berefek kepada efektifitas penyelenggaraan program kesejahteraan sosial
- b. Sasaran : Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan social
- III. Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan
- IV. Anggaran Kegiatan : 251.346.000
- V. Volume Kegiatan : 1000 Orang
- VI. Indikator Kinerja Kegiatan
- a. Input/Masukan : 251.346.000
- b. Output/Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata
- c. Outcome/Hasil : Ketepatan sasaran Bantuan Sosial
- VII. Waktu pelaksanaan dan Time Schedule
- a. Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2026
- b. Time Schedule : Terlampir

Pekalongan, 2 Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN



YGS ROSYIDI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198603 1 007

Mengetahui,
PPTK,


AHMAD HUSNI, S.Kom., M.Eng
Pembina
NIP. 19740923 200501 1 011

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN : Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
KEGIATAN : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota
BIDANG PEMBANGUNAN : Sosial
SKPD : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN

- I Latar Belakang : Dalam upaya mengurangi beban pengeluaran keluarga, perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas
- II Tujuan dan Sasaran Kegiatan
- a. Tujuan : Mengoptimalkan ketepatan bantuan, kelancaran pemberian bantuan dan kelancaran pertanggungjawaban penggunaan bantuan
- b. Sasaran : Presentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial
- III Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan
- IV Anggaran Kegiatan : RP. 321.500.000
- V Volume Kegiatan : 500 Orang
- VI Indikator Kinerja Kegiatan
- a. Input/Masukan : Rp. 321.500.000
- b. Output/Keluaran : Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kab/Kota
- c. Outcome/Hasil : Presentase Penerima Manfaat (PM) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
- VII Waktu Pelaksanaan dan Time Schedule
- a. Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2026
- b. Time Schedule : Terlampir

Pekalongan, 2 Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN



YOS ROSYIDI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198603 1 007

Mengetahui,
PPTK,

AHMAD HUSNI, S.Kom., M.Eng
Pembina
NIP. 19740923 200501 1 011

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN	: Penyediaan Permakanan
KEGIATAN	: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti
BIDANG PEMBANGUNAN	: Sosial
SKPD	: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

-
- I. Latar Belakang : Bidang Rehabilitasi merupakan salah satu bidang yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diselenggarakan melalui sistem kelembagaan di rumah singgah (RPSBM)
- II. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
- a. Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
- b. Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pekalongan
- III. Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan
- IV. Anggaran Kegiatan : Rp 362.270.000,-
- V. Volume Kegiatan : 12 Laporan
- VI. Indikator Kinerja Kegiatan
- a. Input/Masukan : Rp 362.270.000,-
- b. Output/Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kab/Kota
- c. Outcome/Hasil : 100%
- VII. Waktu Pelaksanaan dan Time Schedule
- a. Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2026
- b. Time Schedule : -

Pekalongan, 2 Januari 2026
Mengetahui,

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN

PPTK



YOS ROSYIDI, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198603 1 007



WILDAN ZUHAD, SE.,M.Si
Penata Tk I
NIP. 19851026 201001 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN	: Penyediaan Sandang
KEGIATAN	: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti
BIDANG PEMBANGUNAN	: Sosial
SKPD	: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

-
- I. Latar Belakang : Bidang Rehabilitasi merupakan salah satu bidang yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diselenggarakan melalui sistem kelembagaan di rumah singgah (RPSBM)
- II. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
- a. Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
- b. Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pekalongan
- III. Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan
- IV. Anggaran Kegiatan : Rp 6.775.000,-
- V. Volume Kegiatan : 12 Laporan
- VI. Indikator Kinerja Kegiatan
- a. Input/Masukan : Rp 6.775.000,-
- b. Output/Keluaran : Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kab/Kota
- c. Outcome/Hasil : 100%
- VII. Waktu Pelaksanaan dan Time Schedule
- a. Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2026
- b. Time Schedule : -

Pekalongan, 2 Januari 2026
Mengetahui,

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN

PPTK



YOS ROSYIDI, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198603 1 007



WILDAN ZUHAD, SE.,M.Si
Penata Tk I
NIP. 19851026 201001 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN	: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
KEGIATAN	: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti
BIDANG PEMBANGUNAN	: Sosial
SKPD	: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

-
- I. Latar Belakang : Bidang Rehabilitasi merupakan salah satu bidang yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diselenggarakan melalui sistem kelembagaan di rumah singgah (RPSBM)
- II. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
- a. Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
- b. Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pekalongan
- III. Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan
- IV. Anggaran Kegiatan : Rp 101.417.000,-
- V. Volume Kegiatan : 12 Laporan
- VI. Indikator Kinerja Kegiatan
- a. Input/Masukan : Rp 101.417.000,-
- b. Output/Keluaran : Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kab/Kota
- c. Outcome/Hasil : 100%
- VII. Waktu Pelaksanaan dan Time Schedule
- a. Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2026
- b. Time Schedule : -

Pekalongan, 2 Januari 2026

Mengetahui,

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN

PPTK



YOS ROSYIDI, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198603 1 007



WILDAN ZUHAD, SE.,M.Si
Penata Tk I
NIP. 19851026 201001 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN	: Penyediaan Perbekalan Kesehatan
KEGIATAN	: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti
BIDANG PEMBANGUNAN	: Sosial
SKPD	: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

-
- I. Latar Belakang : Bidang Rehabilitasi merupakan salah satu bidang yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diselenggarakan melalui sistem kelembagaan di rumah singgah (RPSBM)
- II. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
- a. Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
- b. Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pekalongan
- III. Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan
- IV. Anggaran Kegiatan : Rp 6.275.000,-
- V. Volume Kegiatan : 12 Laporan
- VI. Indikator Kinerja Kegiatan
- a. Input/Masukan : Rp 6.275.000,-
- b. Output/Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan Kesehatan di luar panti kewenangan Kab/Kota
- c. Outcome/Hasil : 100%
- VII. Waktu Pelaksanaan dan Time Schedule
- a. Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2026
- b. Time Schedule : -

Pekalongan, 2 Januari 2026
Mengetahui,

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN

PPTK



YOS ROSYIDI, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198603 1 007



WILDAN ZUHAD, SE.,M.Si
Penata Tk I
NIP. 19851026 201001 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN	: Penyediaan Permakanan
KEGIATAN	: Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial
BIDANG PEMBANGUNAN	: Sosial
SKPD	: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

-
- I. Latar Belakang : Bidang Rehabilitasi memiliki tugas dan fungsi melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui pemberian layanan kebutuhan dasar dan pengembangan keterampilan PPKS
- II. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
- a. Tujuan : Menangani permasalahan sosial PPKS di luar panti sosial
- b. Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pekalongan
- III. Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan
- IV. Anggaran Kegiatan : Rp 365.000.000,-
- V. Volume Kegiatan : 3 Laporan
- VI. Indikator Kinerja Kegiatan
- a. Input/Masukan : Rp 365.000.000,-
- b. Output/Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota
- c. Outcome/Hasil : 100%
- VII. Waktu Pelaksanaan dan Time Schedule
- a. Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2026
- b. Time Schedule : -

Pekalongan, 2 Januari 2026
Mengetahui,

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN

PPTK



YOS ROSYIDI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198603 1 007



WILDAN ZUHAD, SE., M.Si
Penata Tk I
NIP. 19851026 201001 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN	: Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
KEGIATAN	: Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial
BIDANG PEMBANGUNAN	: Sosial
SKPD	: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

-
- I. Latar Belakang : Bidang Rehabilitasi memiliki tugas dan fungsi melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui pemberian layanan kebutuhan dasar dan pengembangan keterampilan PPKS
- II. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
- a. Tujuan : Menangani permasalahan sosial PPKS di luar panti sosial
- b. Sasaran Kegiatan : Orang Terlantar
- III. Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan
- IV. Anggaran Kegiatan : Rp 14.250.000,-
- V. Volume Kegiatan : 12 Laporan
- VI. Indikator Kinerja Kegiatan
- a. Input/Masukan : Rp 14.250.000,-
- b. Output/Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kab/Kota
- c. Outcome/Hasil : 100%
- VII. Waktu Pelaksanaan dan Time Schedule
- a. Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2026
- b. Time Schedule : -

Pekalongan, 2 Januari 2026
Mengetahui,

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN

PPTK



YOS ROSYIDI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198603 1 007



WILDAN ZUHAD, SE., M.Si
Penata Tk I
NIP. 19851026 201001 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN	: Penyediaan Makanan
KEGIATAN	: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
BIDANG PEMBANGUNAN	: Sosial
SKPD	: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

-
- I. Latar Belakang : Wilayah Kota Pekalongan memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografie yang menjadikannya potensial, rawan, dan sering mengalami bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial. Sehubungan dengan hal tersebut sangat diperlukan bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menyediakan bantuan makanan sebagai kebutuhan dasar bagi korban apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, non alam dan sosial.
- II. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
- a. Tujuan : Membantu korban bencana dengan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, non alam dan sosial di Kota Pekalongan dengan pengadaan bantuan sosial pangan bagi korban bencana pada saat tanggap darurat bencana
- b. Sasaran Kegiatan : Masyarakat Terdampak Bencana
- III. Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan
- IV. Anggaran Kegiatan : Rp 120.000.000,-
- V. Volume Kegiatan : 1 Laporan
- VI. Indikator Kinerja Kegiatan
- a. Input/Masukan : Rp 120.000.000,-
- b. Output/Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kab/Kota
- c. Outcome/Hasil : 100%
- VII. Waktu Pelaksanaan dan Time Schedule
- a. Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2026
- b. Time Schedule : -

Pekalongan, 2 Januari 2026
Mengetahui,

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN

PPTK



YOS ROSYIDI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19660516 198603 1 007



WILDAN ZUHAD, SE., M.Si
Penata Tk I

NIP. 19851026 201001 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN : **KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD**
KEGIATAN : **PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**
BIDANG PEMBANGUNAN : **SOSIAL**
S K P D : **DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN**

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja DinsosP2KB menyusun rencana kerja anggaran dan laporan-laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- II. **TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**
- A. **TUJUAN** : Tersusunnya RKA (Penetapan dan Perubahan) yang disusun secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- B. **SASARAN** : RKA (Penetapan dan Perubahan).
- III. **LOKASI KEGIATAN** : Kota Pekalongan
- IV. **ANGGARAN KEGIATAN** : Rp 4.264.000,-
- V. **VOLUME KEGIATAN** : 2 Dokumen
- VI. **JENIS KEGIATAN** : Kerangka Anggaran
- VII. **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**
- A. **INPUT / MASUKAN** : Rp. 4.264.000,-
- B. **OUT PUT / KELUARAN**: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- C. **OUT COME / HASIL** : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- VIII. **WAKTU PELAKSANAAN DAN TIME SCHEDULE**
- A. **WAKTU PELAKSANAAN** : Januari s.d Desember 2026.
- B. **TIME SCHEDULE** : -

KEPALA DINSOSP2KB
KOTA PEKALONGAN



YOS ROSYIDI, S.I.P.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 1986031 007

Pekalongan, 2 Januari 2026

Mengetahui,
PTTK,



YULIA MAULIDA, SE
Penata
NIP. 19790719 199803 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN : **EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**
KEGIATAN : **PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN**
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
BIDANG PEMBANGUNAN : **SOSIAL**
S K P D : **DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Dinsosp2kb menyusun 4 Laporan Kinerja Triwulanan, 4 Laporan Pemantauan RTP , 4 Laporan BA RKPD, 1 Laporan Perjanjian Kinerja Penetapan, 1 Laporan Perjanjian Kinerja Perubahan, 1 Laporan SPIP.
- II. **TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**
- A. **TUJUAN** : Tersusunnya 4 Laporan Kinerja Triwulanan, 4 Laporan Pemantauan RTP , 4 Laporan BA RKPD, 1 Laporan Perjanjian Kinerja Penetapan, 1 Laporan Perjanjian Kinerja Perubahan, 1 Laporan SPIP .
- B. **SASARAN** : 4 Laporan Kinerja Triwulanan, 4 Laporan Pemantauan RTP , 4 Laporan BA RKPD, 1 Laporan Perjanjian Kinerja Penetapan, 1 Laporan Perjanjian Kinerja Perubahan, 1 Laporan SPIP
- III. **LOKASI KEGIATAN** : Kota Pekalongan
- IV. **ANGGARAN KEGIATAN** : Rp. 6.386.000,-
- V. **VOLUME KEGIATAN** : 15 Laporan
- VI. **JENIS KEGIATAN** : Kerangka Anggaran
- VII. **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**
- A. **INPUT / MASUKAN** : Rp. 6.386.000,-
- B. **OUT PUT / KELUARAN**: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- C. **OUT COME / HASIL** : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- VIII. **WAKTU PELAKSANAAN DAN TIME SCHEDULE**
- A. **WAKTU PELAKSANAAN** : Januari s.d Desember 2026.
- B. **TIME SCHEDULE** : -

Pekalongan, 2 Januari 2026

Mengetahui,
PPTK,

KEPALA DINSOSP2KB
KOTA PEKALONGAN



YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660516 1986031 007

YULIA MAULIDA, SE

Penata

NIP. 19790719 199803 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN : **KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD**
KEGIATAN : **ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**
BIDANG PEMBANGUNAN S K P D : **SOSIAL**
: **DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN**

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Dinsosp2kb menyusun laporan-laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- II. **TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**
- A. **TUJUAN** : Tersusunnya laporan-laporan keuangan yang disusun secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- B. **SASARAN** : Laporan-laporan keuangan SKPD (CaLK).
- III. **LOKASI KEGIATAN** : Kota Pekalongan
- IV. **ANGGARAN KEGIATAN** : Rp. 2.903.000,-
- V. **VOLUME KEGIATAN** : 1 Laporan
- VI. **JENIS KEGIATAN** : Kerangka Anggaran
- VII. **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**
- A. **INPUT/MASUKAN** : Rp. 2.903.000,-
- B. **OUTPUT/KELUARAN** : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- C. **OUTCOME/HASIL** : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah.
- VIII. **WAKTU PELAKSANAAN DAN TIME SCHEDULE**
- A. **WAKTU PELAKSANAAN** : Januari s.d. Desember 2026.
- B. **TIME SCHEDULE** : -

KEPALA DINSOSP2KB
KOTA PEKALONGAN



YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 1986031 007

Pekalongan, 2 Januari 2026
Mengetahui,
PTTK,



YULIA MAULIDA, SE
Penata
NIP. 19790719 199803 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL

S K P D : DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN

- I. LATAR BELAKANG : Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu disusun Renja SKPD yang mengacu pada (Rencana Awal) RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- II. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN
- A. TUJUAN : Tersusunnya Dokumen Renja (Penetapan dan Perubahan)
- B. SASARAN : Dokumen Renja (Penetapan dan Perubahan)
- III. LOKASI KEGIATAN : Kota Pekalongan
- IV. ANGGARAN KEGIATAN : Rp. 2.712.000,-
- V. VOLUME KEGIATAN : 2 Dokumen
- VI. JENIS KEGIATAN : Kerangka Anggaran
- VII. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
- A. INPUT / MASUKAN : Rp. 2.712.000,-
- B. OUT PUT / KELUARAN: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- C. OUT COME / HASIL : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- VIII. WAKTU PELAKSANAAN DAN TIME SCHEDULE
- A. WAKTU PELAKSANAAN : Januari s.d. Desember 2026.
- B. TIME SCHEDULE : -

KEPALA DINSOSP2KB
KOTA PEKALONGAN



YOS ROSYIDI, S.I.P.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 1986031 007

Pekalongan, 2 Januari 2026
Mengetahui,
PPTK,



YULIA MAULIDA, SE
Penata
NIP. 19790719 199803 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
BIDANG PEMBANGUNAN	:	SOSIAL
S K P D	:	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN

- I. LATAR BELAKANG : Dalam rangka pemenuhan hak-haknya selaku PNS sesuai ketentuan yang berlaku maka untuk mencapai hal tersebut diperlukan data yang akurat tentang PNS. Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada pegawai di luar gaji tetap yang diterima setiap bulannya merupakan salah satu upaya mendekatkan tingkat penghasilan PNS dengan pemenuhan standar hidup minimal. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya dukungan pelayan administrasi khususnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, agar pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan baik
- II. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN
- A. TUJUAN : Terlaksananya pedoman kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS sehingga pengadministrasian keuangan tepat waktu

B. SASARAN : Laporan Penggajian dan Tunjangan ASN
- III. LOKASI KEGIATAN : Kota Pekalongan
- IV. ANGGARAN KEGIATAN : Rp. 2.234.446.000,-
- V. VOLUME KEGIATAN : 19 Orang / Bulan
- VI. JENIS KEGIATAN : Kerangka Anggaran
- VII. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
- A. INPUT / MASUKAN : Rp. 2.234.446.000,-

B. OUT PUT / KELUARAN : Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

C. OUT COME / HASIL : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah
- VIII. WAKTU PELAKSANAAN DAN TIME SCHEDULE
- A. WAKTU PELAKSANAAN : Januari s.d. Desember 2026

B. TIME SCHEDULE : -

KEPALA DINSOSP2KB
KOTA PEKALONGAN



YOS ROSYIDI, S.I.P.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 1986031 007

Pekalongan, 2 Januari 2026
Mengetahui,
PPTK,



YULIA MAULIDA, SE
Penata
NIP. 19790719 199803 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN : **PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**

KEGIATAN : **ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**

BIDANG PEMBANGUNAN : **SOSIAL**

S K P D : **DINSOS P2KB KOTA PEKALONGAN**

- I. **LATAR BELAKANG** : Adanya kebutuhan komponen instalasi listrik sebagai fasilitas penerangan, ketertiban dan keamanan lingkungan.
- II. **TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**
- A. **TUJUAN** : Kelancaran penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan.
- B. **SASARAN** : Dinsos P2KB Kota Pekalongan,
- III. **LOKASI KEGIATAN** : Kota Pekalongan
- IV. **ANGGARAN KEGIATAN** : Rp. 3.000.000,-
- V. **VOLUME KEGIATAN** : 4 Paket
- VI. **JENIS KEGIATAN** : Kerangka Anggaran
- VII. **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**
- A. **INPUT / MASUKAN** : Rp. 3.000.000,-
- B. **OUTPUT / KELUARAN** : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
- C. **OUTCOME / HASIL** : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah.
- VIII. **WAKTU PELAKSANAAN DAN TIME SCHEDULE**
- A. **WAKTU PELAKSANAAN** : Januari s.d. Desember 2026.
- B. **TIME SCHEDULE** : -

Kepala Dinos P2KB Kota Pekalongan

Pekalongan, 2 Januari 2026
PPTK



YOS ROSYIDI, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196605161986031007



TUKIJO, SH
Penata
NIP. 197010252007011011

KERANGKA ACUAN KERJATAHUN 2026

SUB KEGIATAN : **PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**
KEGIATAN : **ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**
BIDANG PEMBANGUNAN : **SOSIAL**
S K P D : **DINSOS P2KB KOTA PEKALONGAN**

- I. **LATAR BELAKANG** : Diperlukannya kebutuhan alat tulis kantor serta sarana prasarana kantor sebagai penunjang kelancaran tugas kantor.
- II. **TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**
- A. **TUJUAN** : Kelancaran penyediaan alat tulis kantor dan sarana prasaran kantor selama 12 bulan.
- B. **SASARAN** : Dinsos P2KB Kota Pekalongan.
- III. **LOKASI KEGIATAN** : Kota Pekalongan
- IV. **ANGGARAN KEGIATAN** : Rp. 19.051.000,-
- V. **VOLUME KEGIATAN** : 4 Paket
- VI. **JENIS KEGIATAN** : Kerangka Anggaran
- VII. **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**
- A. **INPUT / MASUKAN** : Rp. 19.051.000,-
- B. **OUTPUT / KELUARAN** : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.
- C. **OUTCOME / HASIL** : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah.
- VIII. **WAKTU PELAKSANAAN DAN TIME SCHEDULE**
- A. **WAKTU PELAKSANAAN** : Januari s.d. Desember 2026.
- B. **TIME SCHEDULE** : -

Kepala Dinos P2KB Kota Pekalongan



YOS ROSYIDI, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196605161986031007

Pekalongan, 2 Januari 2026
PPTK



TUKIJO, SH
Penata
NIP. 197010252007011011

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN : **PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**
KEGIATAN : **ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**
BIDANG PEMBANGUNAN : **SOSIAL**
S K P D : **DINSOS P2KB KOTA PEKALONGAN**

I. **LATAR BELAKANG** : Kondisi peralatan rumah tangga kantor yang sudah aus dan tidak layak pakai sehingga perlu diadakan penggantian.

II. **TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**

A. **TUJUAN** : Kelancaran penyediaan peralatan rumah tangga.

B. **SASARAN** : Dinsos P2KB Kota Pekalongan .

III. **LOKASI KEGIATAN** : Kota Pekalongan

IV. **ANGGARAN KEGIATAN** : Rp. 1.500.000,-

V. **VOLUME KEGIATAN** : 4 paket.

VI. **JENIS KEGIATAN** : Kerangka Anggaran

VII. **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**

A. **INPUT / MASUKAN** : Rp. 1.500.000,-

B. **OUTPUT / KELUARAN** : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

C. **OUTCOME / HASIL** : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah.

VIII. **WAKTU PELAKSANAAN DAN TIME SCHEDULE**

A. **WAKTU PELAKSANAAN** : Januari s.d. Desember 2026

B. **TIME SCHEDULE** : -.

Kepala Dinos P2KB Kota Pekalongan



YOS ROSYIDI, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196605161986031007

Pekalongan, 2 Januari 2026
PPTK



TUKIJO, SH
Penata
NIP. 197010252007011011

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN : **PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**
KEGIATAN : **ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**
BIDANG PEMBANGUNAN : **SOSIAL**
S K P D : **DINSOS P2KB KOTA PEKALONGAN**

I. **LATAR BELAKANG** : Kebutuhan fasilitas berupa makanan dan minuman untuk para pegawai dan pelaksanaan rapat-rapat kedinasan.

II. **TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**

A. **TUJUAN** : Kelancaran penyediaan makanan dan minuman.

B. **SASARAN** : Dinsos P2KB Kota Pekalongan .

III. **LOKASI KEGIATAN** : Kota Pekalongan

IV. **ANGGARAN KEGIATAN** : Rp. 38.748.000,-

V. **VOLUME KEGIATAN** : 4 Paket.

VI. **JENIS KEGIATAN** : Kerangka Anggaran

VII. **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**

A. **INPUT / MASUKAN** : Rp. 38.748.000,-

B. **OUTPUT / KELUARAN** : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.

C. **OUTCOME / HASIL** : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah.

VIII. **WAKTU PELAKSANAAN DAN TIME SCHEDULE**

A. **WAKTU PELAKSANAAN** : Januari s.d. November 2026

B. **TIME SCHEDULE** : Terlampir

Kepala Dinos P2KB Kota Pekalongan

Pekalongan, 2 Januari 2026
PPTK



YOS ROSYIDI, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196605161986031007



TUKIJO, SH

Penata

NIP. 197010252007011011

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN : **PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**
KEGIATAN : **ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**
BIDANG PEMBANGUNAN : **SOSIAL**
S K P D : **DINSOS P2KB KOTA PEKALONGAN**

I. **LATAR BELAKANG** : Adanya kebutuhan akan barang cetakan serta penggandaan sebagai penunjang kelancaran tugas kantor.

II. **TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**

A. **TUJUAN** : Kelancaran penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan.

B. **SASARAN** : Dinsos P2KB Kota Pekalongan .

III. **LOKASI KEGIATAN** : Kota Pekalongan

IV. **ANGGARAN KEGIATAN** : Rp. 3.892.000,-

V. **VOLUME KEGIATAN** : 13 Paket.

VI. **JENIS KEGIATAN** : Kerangka Anggaran

VII. **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**

INPUT / MASUKAN : Rp. 3.892.000,-

A.

B. **OUTPUT / KELUARAN** : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan.

C. **OUTCOME / HASIL** : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah.

VIII. **WAKTU PELAKSANAAN DAN TIME SCHEDULE**

A. **WAKTU PELAKSANAAN** : Januari s.d. Desember 2026

B. **TIME SCHEDULE** : -

Pekalongan, 2 Januari 2026
PPTK

Kepala Dinos P2KB Kota Pekalongan



YOS ROSYIDI, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196605161986031007



TUKIJO, SH

Penata

NIP. 197010252007011011

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN : **PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**
KEGIATAN : **ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**
BIDANG PEMBANGUNAN : **SOSIAL**
S K P D : **DINSOS P2KB KOTA PEKALONGAN**

- I. **LATAR BELAKANG** : Banyak kegiatan yang harus dikoordinasikan dengan instansi terkait baik ditingkat Provinsi maupun Pusat.
- II. **TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**
- A. **TUJUAN** : Kelancaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan.
- B. **SASARAN** : Dinsos P2KB Kota Pekalongan .
- III. **LOKASI KEGIATAN** : Kota Pekalongan
- IV. **ANGGARAN KEGIATAN** : Rp. 75.854.000,-
- V. **VOLUME KEGIATAN** : 100 Laporan
- VI. **JENIS KEGIATAN** : Kerangka Anggaran
- VII. **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**
- A. **INPUT / MASUKAN** : Rp. 75.854.000,-
- B. **OUTPUT / KELUARAN** : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- C. **OUTCOME / HASIL** : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah.
- VIII. **WAKTU PELAKSANAAN DAN TIME SCHEDULE**
- A. **WAKTU PELAKSANAAN** : Januari s.d. Desember 2026.
- B. **TIME SCHEDULE** : -.

Kepala Dinos P2KB Kota Pekalongan

Pekalongan, 2 Januari 2026
PPTK



YOS ROSYIDI, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196605161986031007



TUKIJO, SH
Penata
NIP. 197010252007011011

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN : **PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**
KEGIATAN : **PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
BIDANG PEMBANGUNAN : **SOSIAL**
S K P D : **DINSOS P2KB KOTA PEKALONGAN**

- I. **LATAR BELAKANG** : Kebutuhan alat penunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.
- II. **TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**
- A. **TUJUAN** : Kelancaran proses surat-menyurat SKPD.
- B. **SASARAN** : Dinsos P2KB Kota Pekalongan .
- III. **LOKASI KEGIATAN** : Kota Pekalongan
- IV. **ANGGARAN KEGIATAN** : Rp. 1.000.000,-
- V. **VOLUME KEGIATAN** : 4 Laporan
- VI. **JENIS KEGIATAN** : Kerangka Anggaran
- VII. **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**
- A. **INPUT / MASUKAN** : Rp. 1.000.000,-
- B. **OUTPUT / KELUARAN** : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- C. **OUTCOME / HASIL** : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- VIII. **WAKTU PELAKSANAAN DAN TIME SCHEDULE**
- A. **WAKTU PELAKSANAAN** : Januari s.d. Desember 2026
- B. **TIME SCHEDULE** : -.

Kepala Dinos P2KB Kota Pekalongan

Pekalongan, 2 Januari 2026
PPTK



YOS ROSYIDI, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196605161986031007



TUKIJO, SH
Penata
NIP. 197010252007011011

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN : **PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**

KEGIATAN : **PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

BIDANG PEMBANGUNAN : **SOSIAL**

S K P D : **DINSOS P2KB KOTA PEKALONGAN**

- I. **LATAR BELAKANG** : Diperlukannya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan .
- II. **TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**
- A. **TUJUAN** : Kelancaran penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan.
- B. **SASARAN** : Dinsos P2KB Kota Pekalongan Meliputi Dinsos Baru, 4 Balai KB, RPSBM, Taman Makam Pahlawan.
- III. **LOKASI KEGIATAN** : Kota Pekalongan
- IV. **ANGGARAN KEGIATAN** : Rp. 161.436.000,-
- V. **VOLUME KEGIATAN** : 12 Laporan
- VI. **JENIS KEGIATAN** : Kerangka Anggaran
- VII. **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**
- A. **INPUT / MASUKAN** : Rp. 161.436.000,-
- B. **OUTPUT / KELUARAN** : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.
- C. **OUTCOME / HASIL** : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- VIII. **WAKTU PELAKSANAAN DAN TIME SCHEDULE**
- A. **WAKTU PELAKSANAAN** : Januari s.d. Desember 2026
- B. **TIME SCHEDULE** : -

Kepala Dinos P2KB Kota Pekalongan

Pekalongan, 2 Januari 2026
PPTK



YOS ROSYIDI, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196605161986031007



TUKIJO, SH
Penata
NIP. 197010252007011011

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN : **PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR**
KEGIATAN : **PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
BIDANG PEMBANGUNAN : **SOSIAL**
S K P D : **DINSOS P2KB KOTA PEKALONGAN**

- I. **LATAR BELAKANG** : Diperlukannya kebutuhan jasa administrasi PPPK Paruh Waktu dan Jasa Penjaga Malam kantor sebagai penunjang kelancaran tugas kantor.
- II. **TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**
- A. **TUJUAN** : Kelancaran penyediaan jasa administrasi PPPK- PW 58 orang dan penjaga malam kantor 1 orang dan petugas kebersihan 1 orang.
- B. **SASARAN** : Dinsos P2KB Kota Pekalongan.
- III. **LOKASI KEGIATAN** : Kota Pekalongan
- IV. **ANGGARAN KEGIATAN** : Rp.1.574.796.000,-
- V. **VOLUME KEGIATAN** : 12 Laporan
- VI. **JENIS KEGIATAN** : Kerangka Anggaran
- VII. **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**
- A. **INPUT / MASUKAN** : Rp. 1.574.796.000,-
- B. **OUT PUT / KELUARAN** : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.
- C. **OUT COME / HASIL** : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- VIII. **WAKTU PELAKSANAAN DAN TIME SCHEDULE**
- A. **WAKTU PELAKSANAAN** : Januari s.d. Desember 2026
- B. **TIME SCHEDULE** : -

Kepala Dinos P2KB Kota Pekalongan

Pekalongan, 2 Januari 2026
PPTK



YOS ROSYIDI, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196605161986031007



TUKIJO, SH

Penata

NIP. 197010252007011011

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

SUB KEGIATAN : **PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**

KEGIATAN : **PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

BIDANG PEMBANGUNAN : **SOSIAL**

S K P D : **DINSOS P2KB KOTA PEKALONGAN**

- I. **LATAR BELAKANG** : Adanya kendaraan roda empat dan roda dua dinas yang digunakan untuk kegiatan operasional kedinasan.
- II. **TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**
- A. **TUJUAN** : Terjaganya kualitas, daya guna dan daya dukung dalam pelaksanaan tupoksi.
- B. **SASARAN** : Dinsos P2KB Kota Pekalongan .
- III. **LOKASI KEGIATAN** : Kota Pekalongan
- IV. **ANGGARAN KEGIATAN** : Rp. 115.905.000,-
- V. **VOLUME KEGIATAN** : 65 unit
- VI. **JENIS KEGIATAN** : Kerangka Anggaran
- VII. **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**
- A. **INPUT / MASUKAN** : Rp. 115.905.000,-
- B. **OUTPUT / KELUARAN** : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.
- C. **OUTCOME / HASIL** : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- VIII. **WAKTU PELAKSANAAN DAN TIME SCHEDULE**
- A. **WAKTU PELAKSANAAN** : Januari s.d. Desember 2026
- B. **TIME SCHEDULE** : -

Kepala Dinos P2KB Kota Pekalongan

Pekalongan, 2 Januari 2026
PPTK



YOS ROSYIDI, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196605161986031007



TUKIJO, SH
Penata
NIP. 197010252007011011

KERANGKA ACUAN KERJATAHUN 2026

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG
KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL

S K P D : DINSOS P2KB KOTA PEKALONGAN

I. LATAR BELAKANG : Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga tugas-tugas kedinasan lancar.

II. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

A. TUJUAN : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor.

B. SASARAN : Dinsos P2KB Kota Pekalongan .

III. LOKASI KEGIATAN : Kota Pekalongan

IV. ANGGARAN KEGIATAN : Rp. 33.986.000,-

V. VOLUME KEGIATAN : 3 Unit

VI. JENIS KEGIATAN : Kerangka Anggaran

VII. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

A. INPUT / MASUKAN : Rp. 33.986.000,-

B. OUT PUT / KELUARAN : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

C. OUT COME / HASIL : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

VIII. WAKTU PELAKSANAAN DAN TIME SCHEDULE

A. WAKTU PELAKSANAAN : Januari s.d. Desember 2026

B. TIME SCHEDULE :-

Kepala Dinos P2KB Kota Pekalongan

Pekalongan, 2 Januari 2026
PPTK



YOS ROSYIDI, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196605161986031007



TUKIJO, SH

Penata

NIP. 197010252007011011

KERANGKA ACUAN KERJATAHUN 2026

SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PEMBANGUNAN	: SOSIAL
S K P D	: DINSOS P2KB KOTA PEKALONGAN

- I. LATAR BELAKANG : Banyaknya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang perlu dipelihara secara rutin maupun berkala.
- II. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN
- A. TUJUAN : Terjaganya kualitas, daya guna dan daya dukung dalam pelaksanaan tupoksi.
- B. SASARAN : Dinsos P2KB Kota Pekalongan
- III. LOKASI KEGIATAN : Kota Pekalongan
- IV. ANGGARAN KEGIATAN : Rp. 25.000.000,-
- V. VOLUME KEGIATAN : 25 Unit
- VI. JENIS KEGIATAN : Kerangka Anggaran
- VII. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
- A. INPUT / MASUKAN : Rp. 25.000.000,-
- B. OUTPUT / KELUARAN : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.
- C. OUTCOME / HASIL : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- VIII. WAKTU PELAKSANAAN DAN TIME SCHEDULE
- A. WAKTU PELAKSANAAN : Januari s.d. Desember 2026
- B. TIME SCHEDULE : -

Kepala Dinos P2KB Kota Pekalongan

Pekalongan, 2 Januari 2026
PPTK



YOS ROSYIDI, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196605161986031007



TUKIJO, SH
Penata
NIP. 197010252007011011

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN TAHUN 2026
OPD/UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
KOTA PEKALONGAN

No.	Nama Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran/Hasil Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggungjawab / PPTK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Untuk mendukung kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, maka diperlukan pemenuhan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Untuk memenuhi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	14.584.000,00	Lusiana Widyastuti, S.E., M.Si.
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Untuk mendukung kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, maka diperlukan pemenuhan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Untuk memenuhi Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1.128.000,00	Lusiana Widyastuti, S.E., M.Si.
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Untuk mendukung kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, maka diperlukan pemenuhan kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Untuk memenuhi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	31.937.000,00	Lusiana Widyastuti, S.E., M.Si.
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Untuk mendukung kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah maka diperlukan pemenuhan kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Untuk memenuhi kebutuhan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.906.325.000,00	Lusiana Widyastuti, S.E., M.Si.
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Untuk mendukung Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah maka diperlukan pemenuhan kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26.148.000,00	Lusiana Widyastuti, S.E., M.Si.

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Untuk mendukung Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah maka diperlukan pemenuhan kegiatan koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Untuk memenuhi kebutuhan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	789.000,00	Lusiana Widyastuti, S.E., M.Si.
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Untuk mendukung kegiatan Administrasi umum perangkat daerah maka diperlukan pemenuhan kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Untuk memenuhi kebutuhan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	23.911.000,00	Yusuf Mashudi, A.Md.
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Untuk mendukung Kegiatan administrasi umum perangkat daerah maka diperlukan pemenuhan kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Untuk memenuhi kebutuhan penyediaan bahan logistik kantor	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	101.728.000,00	Yusuf Mashudi, A.Md.
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Untuk mendukung kegiatan administrasi umum perangkat daerah maka diperlukan pemenuhan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Untuk memenuhi kebutuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	18.581.000,00	Yusuf Mashudi, A.Md.

10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Untuk memenuhi kegiatan administrasi umum perangkat daerah maka diperlukan pemenuhan kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	110.717.000,00	Yusuf Mashudi, A.Md.
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Untuk Program pelayanan administrasi perkantoran maka diperlukan pemenuhan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Untuk memenuhi kebutuhan penyediaan jasa surat menyurat selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	1.560.000,00	Yusuf Mashudi, A.Md.
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Untuk mendukung program pelayanan administrasi perkantoran maka diperlukan pemenuhan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Untuk memenuhi kebutuhan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	481.226.000,00	Yusuf Mashudi, A.Md.
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Untuk mendukung kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah maka diperlukan pemenuhan kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Untuk memenuhi kebutuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	8.152.106.000,00	Yusuf Mashudi, A.Md.
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Untuk mendukung kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah maka diperlukan pemenuhan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Untuk memenuhi kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	104.172.000,00	Yusuf Mashudi, A.Md.
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Untuk mendukung kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah maka diperlukan pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Untuk memenuhi kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	3.573.791.000,00	Yusuf Mashudi, A.Md.

16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Untuk mendukung kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah maka diperlukan pemenuhan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Untuk memenuhi kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	147.055.000,00	Yusuf Mashudi, A.Md.
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Untuk mendukung kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah maka diperlukan pemenuhan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Untuk memenuhi kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9.125.000,00	Yusuf Mashudi, A.Md.
18	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Untuk mendukung kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maka diperlukan pemenuhan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Untuk memenuhi kebutuhan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	113.456.000,00	Adi Usnan, S.E.
19	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Untuk mendukung kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maka diperlukan pemenuhan kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Untuk memenuhi kebutuhan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	162.008.000,00	Adi Usnan, S.E.

20	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Untuk mendukung kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maka diperlukan pemenuhan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Untuk memenuhi kebutuhan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kab/kota yang dilaksanakan	5.113.000,00	Adi Usnan, S.E.
21	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Untuk mendukung kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maka diperlukan pemenuhan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Untuk memenuhi kebutuhan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	196.071.000,00	Adi Usnan, S.E.
22	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Untuk mendukung kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota maka diperlukan pemenuhan kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Untuk memenuhi kebutuhan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	500.445.000,00	Adi Usnan, S.E.
23	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Untuk mendukung kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota maka diperlukan pemenuhan kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Untuk memenuhi kebutuhan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Unit taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	267.504.000,00	Adi Usnan, S.E.
24	Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Untuk mendukung kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 maka diperlukan pemenuhan kegiatan Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Untuk memenuhi kebutuhan Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	195.000,00	Adi Usnan, S.E.

25	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Untuk mendukung kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota maka diperlukan pemenuhan kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Untuk memenuhi kebutuhan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	769.000,00	Agus Kurniawan, S.Akun.
26	Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Untuk mendukung kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota maka diperlukan pemenuhan kegiatan Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	2.673.000,00	Agus Kurniawan, S.Akun.
27	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota maka diperlukan kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Untuk memenuhi Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	9.498.000,00	Agus Kurniawan, S.Akun.
28	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota, maka diperlukan kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Untuk memenuhi Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup selama 1 tahun anggaran dengan lancar	ÁPBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah Masyarakat/Kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	8.464.000,00	Agus Kurniawan, S.Akun.
29	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempok masyarakat	Untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota, maka diperlukan kegiatan Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempok masyarakat	Untuk memenuhi Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempok masyarakat selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3.409.000,00	Agus Kurniawan, S.Akun.

30	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Untuk mendukung kegiatan Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota, maka diperlukan kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Untuk memenuhi Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	25.000.000,00	Agus Kurniawan, S.Akun.
31	Pengelolaan Pengaduan permasalahan PPLH Kabupaten/Kota	Untuk mendukung kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, maka diperlukan kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan PPLH Kabupaten/Kota	Untuk memenuhi Pengelolaan Pengaduan permasalahan PPLH Kabupaten/Kota selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	883.000,00	Agus Kurniawan, S.Akun.
32	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kab/kota	Untuk mendukung kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, maka diperlukan kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kab/kota	Untuk memenuhi Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kab/kota selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	142.000,00	Agus Kurniawan, S.Akun.

33	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah, maka diperlukan kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Untuk memenuhi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau pra pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	603.400.000,00	Adi Setiawan, S.E.
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah, maka diperlukan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Untuk memenuhi Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kab/kota untuk pengelolaan sampah kab/kota. Pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada	3.522.750.000,00	Adi Setiawan, S.E.
35	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah, maka diperlukan kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Untuk memenuhi Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota selama 1 tahun anggaran dengan lancar	APBD	Januari s/d Desember 2026	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kab/kota atau TPA/TPST Regional	5.395.868.000,00	Adi Setiawan, S.E.
JUMLAH							32.522.531.000,00	

Pekalongan, 6 Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pekalongan



LOKO PURNOMO, S.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671109 199603 1 002

**AGENDA HARIAN KEPALA DLH
BULAN JANUARI 2026**

NO	WAKTU	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
1	Jum'at, 2 Januari 2026	Monitoring Ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	TPA Degayu	
2	Senin, 5 Januari 2026	Memimpin rapat koordinasi pelayanan kebersihan	DLH Kota Pekalongan	Bersama dengan Bidang KPS DLH
3	Selasa, 6 Januari 2026	Memimpin rapat koordinasi dengan bidang KPS mengenai aduan dari masyarakat	DLH Kota Pekalongan	Bersama dengan Bidang KPS DLH
4	Rabu, 7 Januari 2026	Monitoring Ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	TPA Degayu	
5	Kamis, 8 Januari 2026	Monitoring Ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	TPA Degayu	
6	Jum'at, 9 Januari 2026	Monitoring Ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	TPA Degayu	
7	Senin, 12 Januari 2026	Memimpin Rapat koordinasi perencanaan pekerjaan perluasan hanggar TPS3R Krapyak dan pekerjaan IPAL Degayu	DLH Kota Pekalongan	Bersama dengan Bidang KPS dan Bidang PPKL RTH DLH
8	Selasa, 13 Januari 2026	Memimpin rapat koordinasi penyiapan dan review LKPD	DLH Kota Pekalongan	Bersama Sekretariat dan Bidang2 di DLH
9	Rabu, 14 Januari 2026	Rapat Koordinasi dengan RSUD Bendan	RSUD Bendan	
10	Kamis, 15 Januari 2026	Monitoring Ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	TPA Degayu	
11	Senin, 19 Januari 2026	Memimpin rapat koordinasi persiapan penilaian adipura	DLH Kota Pekalongan	
12	Selasa, 20 Januari 2026	Melaksanakan rapat koordinasi dengan Assisten 2 Setda Kota Pekalongan & investor WTE	Setda Kota Pekalongan	
13	Rabu, 21 Januari 2026	Mendampingi Tim kementerian Lingkungan Hidup untuk penilaian adipura dan pengelolaan sampah di Kota Pekalongan	TPA Degayu	
14	Kamis, 22 Januari 2026	Mengikuti rapat koordinasi perencanaan sarpras dan kelembagaan pengelolaan sampah kota Pekalongan	Bapperida Kota Pekalongan	
15	Jum'at, 23 Januari 2026	Rapat teknis pembahasan kesepakatan bersama antara pem kabupaten Pekalongan, Pem Kota Pekalongan, dan pem Kab Pemalang tentang pengelolaan sampah	Setda Kabupaten Pekalongan	
16	Senin, 26 Januari 2026	Memimpin apel pagi	DLH Kota Pekalongan	
17	Selasa, 27 Januari 2026	Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang tentang pengelolaan sampah	Hotel Aston Kota Pekalongan	
18	Rabu, 28 Januari 2026	Memimpin rapat koordinasi dengan sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan DLH dalam rangka movev kegiatan di DLH	DLH Kota Pekalongan	Bersama Sekretariat dan Bidang2 di DLH
19	Kamis, 29 Januari 2026	Memimpin Rapat Koordinasi membahas pergeseran anggaran dan kegiatan penanganan sampah tahun 2026	DLH Kota Pekalongan	
20	Jum'at, 30 Januari 2026	Memimpin Rapat Pembahasan Pemintaan Informasi Publik	DLH Kota Pekalongan	

MENGETAHUI
KEPALA DLH



JOKO PURNOMO, ST
NIP. 19671109 199603 1 002

**PROGRAM/KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN
DAN ATAU TELAH DIJALANKAN DI TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Sumber Anggaran	Anggaran	Jadwal Pelaksanaan	PPTK
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	DAU	Rp 1.330.000	Januari s/d Desember 2026	Sri Fadillah, S.AP,MM
2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	DAU	Rp 1.650.000	Januari s/d Desember 2026	Sri Fadillah, S.AP,MM
3			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	DAU	Rp 8.999.000	Januari s/d Desember 2026	Sri Fadillah, S.AP,MM
4		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan	DAU	Rp 5.453.975.000	Januari s/d Desember 2026	Sri Fadillah, S.AP,MM
5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	DAU	Rp 1.650.000	Januari s/d Desember 2026	Sri Fadillah, S.AP,MM
7		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	DAU	Rp 500.000	Januari s/d Desember 2026	Yuhana Mariya, SH
8			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Retribusi Jasa Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 5.931.000	Januari s/d Desember 2026	Yuhana Mariya, SH
9			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	DAU	Rp 500.000	Januari s/d Desember 2026	Yuhana Mariya, SH
10			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	DAU	Rp 35.402.000	Januari s/d Desember 2026	Yuhana Mariya, SH
11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	DAU	Rp 2.909.000	Januari s/d Desember 2026	Yuhana Mariya, SH
12			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	DAU	Rp 63.082.000	Januari s/d Desember 2026	Yuhana Mariya, SH
13		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	DAU	Rp 200.000	Januari s/d Desember 2026	Yuhana Mariya, SH
14			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	DAU	Rp 117.470.000	Januari s/d Desember 2026	Yuhana Mariya, SH
15		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	DAU	Rp 230.118.000	Januari s/d Desember 2026	Yuhana Mariya, SH
18			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 154.000.000	Januari s/d Desember 2026	Yuhana Mariya, SH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Sumber Anggaran	Anggaran	Jadwal Pelaksanaan	PPTK
19	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	18 Dokumen	DAU	Rp 338.154.000	Januari s/d Desember 2026	Desi Testiyanto, SKM., M.M
20			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	1 Orang	DAU	Rp 1.287.000	Januari s/d Desember 2026	Desi Testiyanto, SKM., M.M
22			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 Laporan	DAU	Rp 177.549.000	Januari s/d Desember 2026	Desi Testiyanto, SKM., M.M
23			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	7 Laporan	DAU	Rp 2.375.000	Januari s/d Desember 2026	Desi Testiyanto, SKM., M.M
24		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Rp 150.000.000	Januari s/d Desember 2026	Agung Jaya Kusama Aji, SH
26			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 3.382.128.000	Januari s/d Desember 2026	Agung Jaya Kusama Aji, SH
30	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 564.997.000	Januari s/d Desember 2026	Kukuh Adi Sri Satyanto,S.T.,M.M
31			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1 Orang	DAU	Rp 702.000	Januari s/d Desember 2026	Kukuh Adi Sri Satyanto,S.T.,M.M
33			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	48 Unit	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 150.000.000	Januari s/d Desember 2026	Kukuh Adi Sri Satyanto,S.T.,M.M
37		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	DAU	Rp 1.898.000	Januari s/d Desember 2026	Kukuh Adi Sri Satyanto,S.T.,M.M

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN TAHUN 2026

OPD/UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEKALONGAN

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	LATAR BELAKANG	MAKSUD DAN TUJUAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	KELUARAN/HASIL SUB KEGIATAN	TOTAL BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								10,846,806,000.00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								6,077,716,000.00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							11,979,000.00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kebutuhan dasar dalam pelayanan publik berupa penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah	Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pencapaian SPM dan Peningkatan Budaya Kerja Prima	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1,330,000.00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kebutuhan dasar dalam pelayanan publik berupa penyusunan dokumen RKA-SKPD	Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pencapaian SPM dan Peningkatan Budaya Kerja Prima	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,650,000.00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kebutuhan dasar dalam pelayanan publik berupa penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pencapaian SPM dan Peningkatan Budaya Kerja Prima	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8,999,000.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,455,625,000.00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kebutuhan dasar dalam pelayanan publik berupa penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pencapaian SPM dan Peningkatan Budaya Kerja Prima	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	5,453,975,000.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kebutuhan dasar dalam pelayanan publik berupa penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pencapaian SPM dan Peningkatan Budaya Kerja Prima	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1,650,000.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							108,324,000.00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan dasar dalam pelayanan publik berupa jasa listrik /penerangan bangunan kantor	Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pencapaian SPM dan Peningkatan Budaya Kerja Prima	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	500,000.00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan dasar dalam pelayanan publik berupa pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pencapaian SPM dan Peningkatan Budaya Kerja Prima	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5,931,000.00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan dasar dalam pelayanan publik berupa penyediaan perlatan rumah tangga	Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pencapaian SPM dan Peningkatan Budaya Kerja Prima	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	500,000.00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan dasar dalam pelayanan publik berupa jasa minum untuk karyawan dan jamuan tamu	Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pencapaian SPM dan Peningkatan Budaya Kerja Prima	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	35,402,000.00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan dasar dalam pelayanan publik berupa jasa cetak dan penggandaan	Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pencapaian SPM dan Peningkatan Budaya Kerja Prima	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2,909,000.00

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	LATAR BELAKANG	MAKSUD DAN TUJUAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	KELUARAN/HASIL SUB KEGIATAN	TOTAL BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kebutuhan dasar dalam pelayanan publik berupa fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pencapaian SPM dan Peningkatan Budaya Kerja Prima	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	63,082,000.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							117,670,000.00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan dasar dalam pelayanan publik berupa jasa surat	Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pencapaian SPM dan Peningkatan Budaya Kerja Prima	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	200,000.00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan dasar dalam pelayanan publik berupa jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pencapaian SPM dan Peningkatan Budaya Kerja Prima	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	117,470,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							384,118,000.00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kebutuhan dasar dalam pelayanan publik berupa pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pencapaian SPM dan Peningkatan Budaya Kerja Prima	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	230,118,000.00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kebutuhan dasar dalam pelayanan publik berupa pemeliharaan rutin sarana dan prasana gedung kantor	Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pencapaian SPM dan Peningkatan Budaya Kerja Prima	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	154,000,000.00
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum								4,051,493,000.00
		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota							519,365,000.00
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kebutuhan pelaksanaan pengamanan pada Hari Besar Keagamaan, Natal dan Tahun Baru serta kegiatan Operasional Linmas	Peningkatan keamanan pada saat Hari Besar Keagamaan, Natal dan Tahun Baru serta kelancaran kegiatan operasional Linmas	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	338,154,000.00
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kebutuhan akan pembinaan/evaluasi dan pelatihan SDM anggota Satpol PP	Terwujudnya SDM Satpol PP yang disiplin, humanis dan profesional	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	1,287,000.00
			Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kebutuhan data awal dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	Terciptanya lingkungan yang tertib	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	177,549,000.00

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	LATAR BELAKANG	MAKSUD DAN TUJUAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	KELUARAN/HASIL SUB KEGIATAN	TOTAL BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kebutuhan komunikasi dan pemberdayaan masyarakat dengan pelaksanaan kegiatan Sarasehan Kantrantibmas dan Kegiatan Kader Siaga Trantib (KST)	Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi mengenai Kantrantibmas dan pemberdayaan masyarakat	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2,375,000.00
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaetrn/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota							3,532,128,000.00
			Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kebutuhan untuk mensosialisasikan peraturan tentang rokok cukai ilegal	Masyarakat yang paham akan peraturan tentang larangan rokok tanpa cukai	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	150,000,000.00
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kebutuhan pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perwal	Terlaksananya Operasi Penegakan Perda dan Perwal di wilayah Kota Pekalongan sehingga terwujud keamanan, ketertiban, ketenteraman masyarakat di wilayah Kota Pekalongan	APBD - DBHCHT	Jan-Des 2026	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	3,382,128,000.00
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran								717,597,000.00
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							715,699,000.00
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kebutuhan menanggulangi kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan	Tertanganinya bahaya kebakaran dan Non Kebakaran	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	564,997,000.00
			Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Kebutuhan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas anggota Pemadam Kebakaran	Terwujudnya SDM Aparatur damkar yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	702,000.00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Terpenuhinya sarana dan prasarana pemadam kebakaran	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	150,000,000.00
		Pembrdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran							1,898,000.00
			Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Kebutuhan akan adanya kerjasama dengan relawan pemadam kebakaran sehingga penanganan kebakaran lebih cepat	Terjalinnnya kerjasama dan komunikasi yang baik dengan relawan pemadam kebakaran	APBD	Jan-Des 2026	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	1,898,000.00